

ADMINISTRATIO

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

TOPIK-TOPIK:

STREET LEVEL BUREAUCRACY

(Robi Cahyadi Kurnilawah)

RENT SEEKING BEHAVIOUR

(Syamsul Ma'arif)

INTERAKSI EKSEKUTIF-BIROKRASI

(Alamsyah)

MENINGKATKAN HIPOTESIS GROUPTHINK

DALAM KONTEKS FORMULASI KEBIJAKAN DI INDONESIA

(Abdul Firman Ashaf)

EVALUASI TERHADAP KELAYAKAN PEMBENTUKAN KABUPATEN

(Simon Sumanjaya S dan Yulianto)

PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DAERAH

(Yana Ekana PS)

PERANAN PENDIDIKAN DALAM MEMOTIVASI DAN MENSEJAHTERAKAN WANITA

(Farida Hasyim)

EVALUASI PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BBM

(Rahayu Sulistiowati)

PENDEKATAN COASTAL LIVELIHOOD SYSTEM ANALYZIS (CLSA)

(Erna Rochana, Kooswardhono Mudikjo, Luky Adrianto, Sugeng Budhiharsono)

ADMINISTRATIO

JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI PUBLIK DAN PEMBANGUNAN

ADMINISTRATIO diterbitkan dua kali setahun oleh Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung, sebagai salah satu media publikasi gagasan-gagasan dan kajian ilmiah di bidang administrasi publik dan pembangunan. Visi *ADMINISTRATIO* adalah menjadi Jurnal Ilmiah di bidang administrasi publik dan pembangunan yang kredibel, representatif, konsisten dan terakreditasi tinggi.

SUSUNAN PENGELOLA JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN PEMBANGUNAN (JAPP)

Penanggung Jawab : Rahayu Sulistiowati, S.Sos, M.Si

Dewan Penyunting
Ketua
Anggota

- : Dr. Yulianto, Drs, M.S (Unila)
1. Dr. Didin Muhafidin, Drs, M.S (Unpad)
 2. Dr. Rahman Hadi, Drs, M.Si (Pemda Lampung)
 3. Dr. Listyo Bawono Irianto, Drs, M.Si (UT Jakarta)
 4. Syamsul Ma'arif, S.IP, M.Si
 5. Meiliyana, S.IP, M.A
 6. Eko Budi Sulistio, S.AP, M.AP

Penyunting Teknis : Nana Mulyana, S.Sos, M.Si
Distribusi : Dewie Brima Atika, S.IP, M.Si
Staf Sekretariat : Mertayana

Alamat Redaksi:

Gedung B Lt. 1 FISIP Universitas Lampung, Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, Telp/ Fax (0721) 708881, e-mail: administratio_app@yahoo.com

DAFTAR ISI

29.	Street Level Bureaucracy..... (Robi Cahyadi Kurniawan)	298
30.	Rent Seeking Behaviour..... (Syamsul Ma'arif)	309
31.	Interaksi Eksekutif-Birokrasi di Kota Bandarlampung..... (Alamsyah)	320
32.	Mengkritisi Hipotesis "Groupthink" dalam Konteks Formulasi Kebijakan Di Indonesia..... (Abdul Firman Ashaf)	330
33.	Evaluasi Terhadap Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung..... (Simon Sumanjoyo S dan Yulianto)	338
34.	Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Melalui Pengembangan Pendidikan dan Latihan Dengan Pendekatan <i>Competency Based Training</i> (Yana Ekana PS)	353
35.	Peranan Pendidikan Dalam Memotivasi Dan Mensejahterakan Wanita Dalam Pembangunan Desa, Studi Peningkatan Peran Wanita Di Bidang Publik Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara..... (Farida Hasyim)	363
35.	Evaluasi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Sumbangan Langsung Tunai Di Kalurahan Kallawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung..... (Rahayu Sulistiowati)	369
36.	Pendekatan <i>Coastal Livelihood System Analyzis (CLSA)</i> Untuk Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Di Desa Patimban-Pesisir Subang Jawa Barat)..... (Erna Rochana, Kooswardhono Mudikdjo, Luky Adrianto, Sugeng Budhiharsono)	382

EVALUASI PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK
(PKPS - BBM) PROGRAM SUMBANGAN LANGSUNG TUNAI

DI KELURAHAN KALIAWI KECAMATAN TANJUNGPUSAT
KOTA BANDAR LAMPUNG 2007

Oleh

Rahayu Sulistiowati

Dosen Jurusan Administrasi Negara Fisip Universitas Lampung

Abstrak

This research aims to evaluate implementation of the compensation program of oil subsidy reduction through the cash direct aid in Sub-district of Kaliawi, District of Central Tanjungkarang, Municipality of Bandar Lampung. This research is including to the type of Project Monitoring Evaluation Research. Technique of data gathering uses interview, observation, and documentation. Concludedly, implementation of program has run well enough. This conclusion is based on answers of entire focus research: (1) Program has been truly received by the targeted group. Receivers of the program benefit are truly people who are including to poor house holders according to criterion of the Central Statistic Bureau; (2) Service has been delivered to all targeted citizens on time till three stages. Unfortunately there is lack of socialization at the beginning, and just be done at second stage of the program. Researcher suggests that (1) the government should perform socialization to citizens before implementing program to avoid confusion of citizens; (2) the government should consider a policy formulation which is truly appropriate to overcome poverty from the root. It is important to be done so as citizens won't perceive it as just temporary help which only makes citizens become depend upon government.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah bangsa-bangsa di dunia, khususnya negara yang sedang berkembang. Di sisi lain negara yang maju sekalipun tidak berarti telah bebas dari kemiskinan. Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1997 ada lebih dari 1,3 miliar orang miskin di bumi. Barisan orang miskin terus bertambah sekitar 25 juta setiap tahun.

Jika dikonversikan ke dalam angka pertambahan penduduk permenit, maka diketahui bahwa jumlah orang miskin bertambah 47 jiwa per menit.

Sementara itu jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung berdasarkan data yang ada pada BPS Provinsi Lampung selama empat tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung

TAHUN 2002	TAHUN 2003	TAHUN 2004	TAHUN 2005
1,65 juta jiwa (24,05%)	1,57 juta jiwa (22,63%)	1,56 juta jiwa (22,22%)	2,65 juta jiwa

Sumber : BPS Propinsi Lampung, 2006

Kemiskinan dalam hal ini juga memiliki salah satu pokok masalah kebijakan yang dikemukakan oleh

William N. Dunn (2000) yaitu saling ketergantungan, yang artinya bahwa kemiskinan mempengaruhi masalah-

masalah kebijakan di bidang lain. Salah satu kebijakan pembangunan kurun waktu 2004-2009 seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diantaranya memuat target angka kemiskinan dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 8,2% pada tahun 2009. Target tersebut akan berhasil jika daya beli penduduk terus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah dari masa pemerintahan Orde Baru hingga saat ini. Namun demikian agaknya upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut masih perlu ditingkatkan lebih keras lagi karena ternyata penduduk miskin baik di desa maupun di kota masih saja besar jumlahnya. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa proyek-proyek penanggulangan kemiskinan belum efektif. Menurut Deputi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Sujana Royat, "Berbagai proyek penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah dalam 12 tahun terakhir ini dinilai belum efektif. Padahal 12 dari total 55 proyek tersebut menghabiskan dana 100 juta dolar Amerika Serikat". (Kompas, 18 Februari 2006). Fakta yang diungkapkan oleh pejabat di Kementerian Kesra tersebut tidak terlalu mengejutkan. Sebab dalam realitasnya dari hari kehari angka kemiskinan di negara ini semakin mengkhawatirkan.

Beberapa hasil penelitian tentang program-program penanggulangan kemiskinan menunjukkan indikasi ketidakefektifan program tersebut. Salah satu hasil penelitian penulis atas pelaksanaan program beras miskin (Raskin) pada salah satu kecamatan di Kabupaten Tanggamus tahun 2005 menyimpulkan bahwa pelaksanaan program Beras Miskin (Raskin) belum berhasil dengan baik. Kesimpulan ini didasarkan atas tidak tercapainya

tujuan dan ketepatan sasaran yang telah ditetapkan dalam juklak dan juknis program, adanya ketidakjelasan status penerima manfaat yang berarti terjadi ketidaktepatan dalam distribusi raskin. (Wahyudi & Sulstiwati, 2005).

Salah satu kebijakana pemerintah sebagai upaya untuk membantu rakyat miskin karena dampak kenaikan BBM pada Maret 2005 adalah Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) pada tahun anggaran 2005 yang meliputi: bantuan/subsidi di bidang pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur perdesaan, serta sumbangan langsung tunai (SLT) kepada rumah tangga miskin. Kebijakan ini sebenarnya juga sudah dilakukan pada tahun 2003. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PKPS-BBM tahun 2003 tersebut, *misstargeting* merupakan masalah yang secara umum ditemukan di semua daerah, juga ketidak tepatan dalam hal pelaksanaan dan besarnya jumlah bantuan yang diterima. Masalah-masalah serupa juga agaknya terjadi pada pelaksanaan PKPS-BBM tahun 2005 ini. Bahkan dampak yang timbul sangat jauh hingga terjadi pembunuhan terhadap aparat, pengrusakan terhadap kantor dan rumah-rumah warga, ancaman-ancaman terhadap aparat desa, dan lain sebagainya.

Khusus tentang pelaksanaan SLT kepada rumah tangga miskin, pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2005. Secara umum dalam Inpres tersebut diatur tugas-tugas menteri dan kepala BPS agar pelaksanaan SLT dapat berjalan lancar dan tertib. Besarnya Subsidi Langsung Tunai ini adalah Rp. 100.000 per bulan per rumah tangga miskin. Rumah tangga miskin yang memegang KK BBM akan menerima SLT setiap tiga bulan sekali. Pencairan dana kompensasi BBM pada tahap pertama di daerah ditandai pengrusakan-pengrusakan yang

dilakukan oleh warga miskin yang tidak puas dengan pendataan penerima Kartu Kompensasi BBM (KKB) oleh petugas statistik, RT dan RW karena mereka tidak menerima KKB. Untuk Provinsi Lampung, pada Februari 2006 BPS telah membatalkan 31.111 KKB.

Pencairan SLT tahap kedua bulan Maret 2006 ternyata juga masih banyak menuai protes dari keluarga miskin yang tidak masuk dalam dalam daftar penerima SLT. Kasus tentang sekelompok warga miskin yang terdiri dari ibu-ibu dari beberapa kecamatan di wilayah Bandar Lampung yang berdemo menuntut keadilan karena mereka namanya tidak masuk dalam daftar penerima SLT (*Lampung Post*, 27 februari 2006). Begitu juga dengan berita *Lampung Post* tanggal 3 Maret 2006 yang melaporkan tentang sekelompok masyarakat tunanetra mengadakan demonstrasi di Kantor walikota Bandar Lampung menuntut agar mereka dimasukkan dalam daftar penerima SLT karena jelas-jelas mereka adalah kelompok keluarga miskin.

Suatu kebijakan akan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat apabila dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Mekanisme tersebut menyangkut proses administratif, organisasi pelaksana, sampai pada pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat yang dijadikan sasaran program. Sebuah kebijakan yang telah diimplementasikan akan selalu membuahkan hasil, dan setelah diimplementasikan akan terlihat tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan tersebut. Adapun capaian yang mungkin didapat dari sebuah kebijakan yang diimplementasikan dapat berupa *excellent implementation, good implementation, not so good implementation, bad implementation*, atau *nothing*. Maka untuk mengukur berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan diperlukan aktivitas evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik

dapat "mempertanggungjawabkan hasil" dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan atau target kebijakan yang ditentukan (Darwin, 1996:59 dalam Widodo, 2001:212).

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan riset mengenai evaluasi program Sumbangan Langsung Tunai PKPS-BBM untuk mengukur apa yang sudah dicapai oleh program tersebut dan kemudian mengkomparasikan hasilnya dengan tujuan program sehingga nantinya akan dapat diidentifikasi sejauh mana keberhasilan implementasi program tersebut. Karena itulah penelitian ini ingin mengevaluasi sejauhmana pelaksanaan program PKPS-BBM program Sumbangan Langsung Tunai di Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

TINJAUAN PUSTAKA

Persoalan kemiskinan mengandung makna kesenjangan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Ada dua ukuran yang biasa digunakan untuk menganalisis tingkat kemiskinan yaitu (1) kemiskinan absolut, dan (2) kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut berkaitan dengan ketidakmampuan seseorang melampaui ukuran kemiskinan yang ditetapkan. Sedangkan kemiskinan relatif berkaitan dengan perbedaan tingkat pendapatan suatu golongan dibandingkan dengan golongan lain.

BPS menggunakan ukuran kemiskinan absolut berdasarkan pada kebutuhan kalori per hari sebesar 2100 kalori/orang/hari serta pengeluaran non makanan lainnya. Kebutuhan pokok selain makanan meliputi perumahan (penerangan, bahan bakar, dan air bersih), pakaian, barang tahan lama, dan jasa. Menurut PP No. 42 Tahun 1981 (dalam Jamasy, 2004:67-68), fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau

orang yang mempunyai mata-pencarian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

BKKBN memberi definisi kepada keluarga miskin sekali adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak memenuhi salah satu dari tiga indicator yakni: 1) seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari; 2) anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian; 3) bagian lantai yang terluas bukan dari tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga miskin adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi kebutuhan salah satu dari indikator yakni: 1) paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging/telur/ikan; 2) setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru, dan 3) luas lantai rumah paling kurang 8m2 untuk tiap penghuni.

Badan Pusat Statistik menggunakan 13 ukuran kemiskinan / rumah tangga miskin yaitu: 1. Luas bangunan. 2. Jenis lantai. 3. Jenis dinding. 4. Fasilitas buang air besar. 5. Sumber air minum. 6. Sumber penerangan. 7. Jenis bahan bakar untuk memasak. 8. Frekwensi membeli daging, ayam, dan susu dalam seminggu, Frekwensi makan sehari. 9. Jumlah stel pakaian baru yang dibeli dalam setahun., 10. Akses ke puskesmas/poliklinik., 11. Lapangan pekerjaan., 12. Pendidikan tertinggi kepala rumahtangga. 13. Kepemilikan beberapa asset. (Sumber: Buku sosialisasi program SLT, 2005)

Sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang diakibatkan kenaikan BBM pada awal Maret 2005, maka pemerintah meluncurkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) pada tahun anggaran 2005 yang meliputi empat program yaitu: Jaminan pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (JPKMM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan

Khusus Murid (BKM), Infrastruktur Perdesaan (IP), dan Subsidi Langsung Tunai (SLT).

Khusus tentang pelaksanaan SLT kepada rumah tangga miskin, pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2005. Secara umum dalam Inpres tersebut diatur tugas-tugas menteri dan kepala BPS agar pelaksanaan BLT dapat berjalan lancar dan tertib. Besarnya Subsidi Langsung Tunai ini adalah Rp. 100.000 per bulan per rumah tangga miskin. Rumah tangga miskin yang memegang KK BBM akan menerima SLT setiap tiga bulan sekali.

Kemiskinan merupakan masalah besar yang dihadapi negara ini. Berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah untuk menanggulangnya, tetapi nampaknya sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kebijakan pemerintah secara konseptual tidak terlepas dari sebuah bentuk kebijakan publik. Menurut Derbyshire, (1974: 4) "kebijakan publik merupakan sekumpulan kegiatan yang dimaksudkan untuk memberi efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi social ekonomi. W. I Jenkis dalam Solichin Abdul Wahab (1997 : 4) merumuskan kebijakan negara sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan daripada aktor tersebut. Jadi kebijakan publik merupakan wujud dari komitmen pemerintah yang diterjemahkan dalam program-program dan mempunyai tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta tindakan-tindakan pemerintah dalam menyikapi berbagai permasalahan publik.

Menurut Solichin Abdul Wahab (2002: 64), bahwa yang dimaksud

aya
lah
isir
PL.

lon

ias

ia,

i's

th

al
nt

ra

in

m

di

P
si
P

dengan implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau Dekrit Presiden). Van Meter dan Van Horn (1975) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, 2002:65). Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh kedua ahli tersebut diatas disimpulkan bahwa proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Edward III (1980: 10-12) dapat dilihat dari 4 (empat) dimensi yaitu dimensi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana apparatus, dan struktur organisasi serta aliran kerja birokrasi.

Sementara itu tentang evaluasi kebijakan dalam literatur dikatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak (Anderson 1975:151 dalam Winarno, 2001:166). Evaluasi kebijakan tidak hanya untuk melihat hasil (*outcomes*) atau dampak (*impacts*), tetapi juga untuk melihat bagaimana proses implementasi suatu kebijakan dilaksanakan.

Mengenai tipe-tipe riset kebijakan, Rossi et al (1979:32) menyebutkan ada empat tipe riset evaluasi yaitu: (1)

Evaluation for program planning and development atau sering disebut *formative* riset untuk merancang kebijakan agar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki; (2) *Project monitoring evaluation* riset bertujuan untuk menguji apakah suatu kebijakan telah diimplementasikan sesuai dengan rancangan kebijakan/proyek dengan memfokuskan pada pertanyaan "apakah kebijakan dapat mencapai wilayah kelompok sasaran (*target group*) dan apakah usaha-usaha yang diambil dalam prakteknya sesuai dengan apa yang terinci dalam desain program". (3) *Impact Evaluation* mengarah pada sejauh mana suatu kebijakan menyebabkan perubahan sesuai dengan yang dikehendaki (*intended impact*); (4) *Economic Efficiency Evaluation* untuk menghitung efisiensi ekonomi kebijakan. Berapa besar cost dan bagaimana jika dibandingkan dengan keuntungan total yang dipeolehnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menekankan pada tipe *project monitoring evaluation research* yaitu penelitian evaluasi untuk melihat bagaimana proses implementasi PKPS BBM program SLT di Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Rossi et al (1979:50) yang menjelaskan bahwa *monitoring evaluation* digunakan untuk menguji implementasi program sesuai dengan desainnya, kemudian ditindaklanjuti dengan mencari jawaban: (1) Apakah implementasi program telah mengarah kepada kelompok sasaran yang ditentukan; (2) Apakah implementasi program telah mendistribusikan pelayanan pada kelompok sasaran sebagaimana diharapkan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis *Project Monitoring Evaluation Research*. Rossi et al (1979:39). Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandarlampung. Dipilihnya daerah

tersebut karena alasan-alasan: (1) Kecamatan tersebut merupakan salah satu wilayah penerima program SLT yang relatif tinggi dari 13 Kecamatan di wilayah Kota Bandar Lampung. (2) Banyak ditemukan keluhan-keluhan dari keluarga miskin yang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan PKPS-BBM (3) Kemudahan aksesibilitas penelitian seperti keterbukaan pelaksana program di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan fokus masalah penelitian sebagai berikut: (1) Aspek masyarakat penerima manfaat SLT, (2) Aspek implementor (aktor pelaksana kebijakan), (3) Aspek sumberdaya, komunikasi, dan informasi. Metode pengumpulan data, menggunakan: Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Proses Analisis Data, mengikuti langkah Miles dan Huberman (1992) yaitu: (1) Reduksi data, (2) Penyajian, (3) Verifikasi.

HASIL PENELITIAN

1. Aspek Masyarakat penerima Manfaat SLT

Secara keseluruhan jumlah keluarga miskin di Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat berjumlah 1.119 KK, tetapi kemudian ketika diadakan pendataan untuk menentukan penerima program SLT, jumlahnya menjadi 1.300 KK. Mengenai aspek ketepatan sasaran penerima manfaat SLT, ketepatan jumlahnya dan ketepatan waktu pencairan dana, berikut ini hasil wawancara dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat diketahui bahwa program SLT sudah tepat sarannya yaitu untuk rumah tangga miskin, demikian juga mengenai jumlahnya yang Rp.100.000,-/bulan atau Rp. 300.000,-/tiga bulan, waktu yang ditentukan oleh pemerintah dalam pencairan dana ini. Sedangkan waktu pencairannya juga sudah tepat yaitu tiga bulan sekali, hanya pencairan dana tahap yang terakhir yang belum

tepat atau belum turun, padahal seharusnya sudah turun bulan September/Oktober 2006 yang lalu, padahal saat ini sudah akhir tahun 2006. Tapi masalah ketidak tepatan waktu pencairan dana tahap terakhir ini tidak hanya terjadi di Kelurahan wilayah penelitian melainkan juga di seluruh Indonesia.

2. Aspek Implementor (Aktor Pelaksana Kebijakan)

Penentuan rumah tangga yang menerima program SLT ini sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan adalah melalui tahap pendataan keluarga yang dilakukan serentak pada bulan Agustus tahun 2005. Mekanisme pendataan warga dilakukan adalah sebagai berikut: : Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pencacahan orang miskin dengan melibatkan berbagai pihak/sumber, antara lain dari : 1. Pemerintah Daerah, 2. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 3. Daftar Keluarga Miskin yang menerima pembebasan biaya sekolah dan perawatan kesehatan, 4. Ketua RT/satuan lingkungan sosial terkecil

Disetiap RT, dusun atau satuan lingkungan sosial terkecil, petugas BPS dibantu oleh tokoh masyarakat setempat dan ketua RT dalam mengumpulkan daftar rumah tangga calon penerima SLT. Rumah tangga tersebut kemudian dikunjungi dan di data ciri-ciri sosial dan tingkat kesejahteraannya, misalnya jumlah dan kualitas makanan (kalori) dalam sehari, jenis lantai tempat tinggal, jenis atap, kepemilikan barang berharga dan sebagainya. Dari data ini, BPSD kemudian melakukan penilaian untuk menentukan golongan rumah tangga miskin, apakah sebuah rumah tangga termasuk dalam golongan sangat miskin, miskin atau hampir miskin.

Selanjutnya mengenai proses penentuan penerimaan program diperoleh data sebagai berikut. Menurut nara sumber dari pihak kelurahan Kaliawi menyatakan bahwa pertama kali

ada surat dari BPS ke kelurahan yang meminta disediakan beberapa orang relawan sebagai petugas pendata yang dibekali dengan tugas-tugas apa yang harus dia lakukan termasuk pengetahuan mengenai kriteria rumah tangga miskin berdasarkan ketentuan dari BPS. Selain konsumsi makanan (kalori), Badan Pusat Statistik menggunakan 13 ukuran kemiskinan / rumah tangga miskin yaitu: 1. Luas bangunan. 2, Jenis lantai.3. Jenis dinding. 4.Fasilitas buang air besar. 5. Sumber air minum. 6. Sumber penerangan. 7. Jenis bahan bakar untuk memasak. 8. Frekwensi membeli daging, ayam, dan susu dalam seminggu, Frekwensi makan sehari. 9. Jumlah stel pakaian baru yang dibeli dalam setahun., 10. Akses ke Puskesmas/poliklinik., 11. Lapangan pekerjaan., 12. Pendidikan tertinggi kepala rumahtangga. 13. Kepemilikan beberapa asset. (Sumber: Buku sosialisasi program SLT,2005)

Badan Pusat Statistik menggunakan 13 ukuran kemiskinan / rumah tangga miskin yaitu: 1. Luas bangunan. 2, Jenis lantai.3. Jenis dinding. 4.Fasilitas buang air besar. 5. Sumber air minum. 6. Sumber penerangan. 7. Jenis bahan bakar untuk memasak. 8. Frekwensi membeli daging, ayam, dan susu dalam seminggu, Frekwensi makan sehari. 9. Jumlah stel pakaian baru yang dibeli dalam setahun., 10. Akses ke Puskesmas/poliklinik., 11. Lapangan pekerjaan., 12. Pendidikan tertinggi kepala rumahtangga. 13. Kepemilikan beberapa asset. (Sumber: Buku sosialisasi program SLT,2005)

3. Aspek Sumber Daya, Komunikasi dan Informasi

Fokus masalah pada aspek sumber daya, komunikasi dan informasi terkait dengan persoalan sosialisai kepada masyarakat dan kendala-kendala sosialisasi serta proses penanganan pengaduan masyarakat. Mengenai proses sosialisasi program SLT kepada

masyarakat, hasil wawancara menunjukkan sosialisasi terlambat dilakukan karena baru pada pencairan tahap ke dua diadakan sosialisasi. Tetapi tidak ada kendala-kendala sosialisasi di lapangan. Sosialisasi pada tahap ke dua dilakukan di mushola atau masjid.

Sedangkan mengenai aspek proses penanganan pengaduan masyarakat, dari hasil wawancara diperoleh jawaban bahwa di Kelurahan Kaliawi memang ada pengaduan-pengaduan dari masyarakat kebanyakan pengaduan dari masyarakat isinya adalah ke warga yang tidak masuk dalam daftar penerima program SLT Kasus ini banyak terjadi pada pencairan tahap II dimana sempat diadakan pendataan baru lagi kepada rumah tangga miskin tetapi setelah masyarakat didata ulang oleh petugas pendata ternyata mereka pada pencairan dana tahap berikutnya tetap tidak mendapatkan dana SLT tersebut. Dengan demikian penanganan pengaduan dari masyarakat mengenai masalah tidak dimasukkannya sebagian masyarakat miskin dalam daftar penerima SLT susulan tidak begitu mendapatkan respon positif dari kelurahan dan pihak kelurahan berdalih bahwa yang menentukan siapa-siapa warga yang berhak mendapatkan bantuan dana SLT adalah pihak BPS kota Bandar Lampung sementara pihak kelurahan hanya bertugas mendata saja.

Sedangkan pengaduan mengenai pemotongan dana SLT tidak ditemukan sama sekali. Kasus yang muncul adalah buka berbentuk pemotongan dana tetapi beberapa warga dengan keikhlasan sendiri memberikan ucapan "terima kasih" kepada ketua RT atau petugas di kelurahan dalam bentuk makanan/minuman ringan atau berbentuk sejumlah uang yang nilainya bervariasi sekitar Rp. 20.000,- s/d Rp.25.000,-.

PEMBAHASAN

Program SLT adalah salah satu Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Program ini dimaksudkan pemerintah untuk membantu warga miskin sesudah adanya kenaikan harga BBM yang mencetuskan kenaikan biaya hidup. Penduduk yang tergolong keluarga miskin (gakin) dianggap layak mendapat uang tunai Rp 1,2 juta per keluarga per tahun (Rp 100.000 per bulan) dan diberikan melalui empat tahap.

Penyaluran SLT tahap pertama sebesar Rp 300.000 per keluarga yang dilakukan Oktober lalu adalah dana bantuan untuk Oktober, November, dan Desember 2005. Total anggaran PKPS-BBM Rp 18,13 triliun diambil dari APBN Perubahan 2005. Program BLT tahun 2005 ini menyerap Rp 4,64 triliun dan berlanjut sampai tahun 2006. Selebihnya untuk pendidikan (Rp 6,27 triliun), kesehatan (Rp 3,87 triliun), dan infrastruktur (Rp 3,34 triliun).

Bantuan dana ini diberikan kepada 15,5 juta keluarga miskin yang tersebar di seluruh Indonesia. Angka 15,5 juta itu diperoleh dari pendataan yang dilakukan BPS bekerja sama dengan aparat pemerintah daerah, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan ketua rukun tetangga (RT).

Pada tahap pendataan ini saja sudah ada masalah. Meski sudah mendapat petunjuk teknis pelaksanaan, perbedaan persepsi para petugas pencacah mengenai kriteria miskin tetap saja ada. Ada petugas pencacah yang memasukkan keluarganya sendiri dalam daftar penerima BLT walau sebetulnya tidak tergolong berkekurangan. Di Sulawesi Utara banyak penerima kartu kompensasi berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan bahkan pedagang makanan yang omzetnya di atas Rp 1 juta sehari. Pada penyaluran SLT tahun 2005, sampai pertengahan Desember baru 90 persen dana bantuan itu yang sampai ke

tangan penduduk. Belum ada daerah yang mencapai 100 persen. Bahkan, Provinsi Papua, Irian Jaya Barat, dan Maluku masih di bawah 60 persen. (Sumber: Kompas Januari 2006).

Sejak awal, program ini sebenarnya sudah memancing polemik. Ada yang menyebut program ini sebagai bagi-bagi hadiah sinterklastik, sejenis politik uang. Pun ada yang menilainya sebagai peninabobokan keluarga miskin dalam kemiskinannya, yang dapat membiasakan orang merasa tidak usah bekerja.

Tahap berikutnya dalam melakukan evaluasi adalah analisis terhadap masalah. Pada tahap ini akan diinventarisir berbagai masalah terkait dengan pelaksanaan program SLT di Kelurahan Kaliawi kecamatan Tanjung Karang Pusat. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program SLT di kelurahan tersebut hanya 2 hal yaitu :

1. Tuntutan dari masyarakat di luar penerima dana SLT yang juga meminta bantuan dana SLT. Berdasarkan observasi peneliti bahwa masyarakat yang menuntut dimasukkannya nama mereka dalam daftar penerima SLT susulan memang adalah masyarakat yang tergolong miskin dengan kehidupan yang memprihatinkan. Ini terlihat dari kondisi rumah tinggal mereka yang sangat sederhana dan bersifat semi permanent, ini pun masih ditambah dengan status kepemilikan rumah tersebut adalah rumah sewa. Pekerjaan mereka kebanyakan buruh di pasar. Sebenarnya kalau menggunakan kriteria dari BPS (14 kriteria) ditambah jumlah kalori makanan yang dikonsumsi, mereka seharusnya memang masuk dalam daftar penerima bantuan SLT tetapi pada kenyataannya mereka tidak

masuk dalam daftar penerima SLT susulan. Hal inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat tidak hanya dilokasi penelitian tetapi di tempat-tempat lain muncul kerusuhan-kerusuhan/amuk warga dengan merusak fasilitas milik pemerintah seperti yang sudah diuraikan pada latar belakang masalah.

2. Masalah pencairan dana SLT tahap terakhir yang sampai saat ini belum juga turun (tetapi masalah yang ini sebenarnya tidak hanya terjadi di lokasi penelitian melainkan juga hampir di semua wilayah Propinsi Lampung bahkan di propinsi lain

di wilayah Indonesia mengalami permasalahan yang sama).

Sebuah program yang baik adalah program yang didukung oleh stakeholdernya. Dalam arti program tersebut benar-benar dilaksanakan secara prosedural, perosesnya benar-benar baik, menggunakan sumberdaya seefisien mungkin dan melibatkan banyak pihak terutama masyarakat. Berdasarkan fokus masalah penelitian maka peneliti menetapkan standar kegiatan yang harus dilaksanakan dalam implementasi program. Standar tersebut yaitu : (1) Standar administrative; (2) Standar kerjasama antar stakeholder; (3) Manajemen sumberdaya. Standar tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2 Tabel Standar Kegiatan dan Pelaksanaan Program

No	Standar	Standarisasi Kegiatan
1.	Standar administratif	Penggunaan kartu BLT setiap kali melakukan pencairan dan pencatatan administrasi yang baik dan tertib.
2.	Standar kerjasama antar Stakeholder	Komunikasi yang internsif. Kerjasama yang baik juga berarti melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peranannya sebagai salah satu stakeholder kebijakan program SLT.
3.	Manajemen sumberdaya	Terkait dengan masalah pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana untuk kelancaran program SLT.

Sumber : Hasil analisis peneliti 2007

Berdasarkan hasil lapangan observasi dan wawancara serta dokumentasi maka dapat disampaikan bahwa dalam pelaksanaan program SLT ini tidak ada masalah yang begitu berarti. Seperti yang telah disampaikan pada bagian yang

terdahulu bahwa masalah yang ditemui tentang tidak dimasukkannya sejumlah keluarga miskin dalam daftar penerima program SLT. Sementara masalah-masalah lain tidak ditemui. Berikut ini hasil komparasi antara fakta dengan standar program kegiatan :

Tabel 3 Hasil Komparasi Antara Fakta dengan Standar Pelaksanaan

No.	Standar	Fakta	Penilaian
1.	Administratif	Mekanisme prosedural sudah baik. Kartu SLT telah dimanfaatkan warga dengan baik tidak ada bukti kartu SLT digadaikan.	Baik.
2.	Kerjasama antar	Proses penentuan penerima dana BLT yang merupakan proses awal dari pelaksanaan	Cukup baik.

	stakeholder	program SLT tidak ada permasalahan, proses tersebut telah melibatkan warga masyarakat walaupun pada faktanya masih banyak warga yang tergolong miskin ternyata tidak masuk dalam daftar penerima program SLT. Pengawasan dari warga masyarakat terhadap program ini belum begitu tinggi.	
3.	Manajemen sumber daya	Terdapat koordinator pelaksanaan pendataan SLT dibantu semua ketua RT kelurahan Kaliawi. Informasi tentang program SLT baru pada tahap kedua sedang tahap pertama tidak ada sosialisasi.	Cukup baik.

Sumber : Hasil analisis peneliti 2007

Pemberian dana kompensasi BBM oleh pemerintah adalah dalam rangka menjaga agar penduduk miskin tidak semakin berat beban hidupnya, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, berkaitan dengan kenaikan harga BBM. Sebagaimana kita ketahui kenaikan harga BBM memiliki implikasi besar bagi kehidupan penduduk miskin. Kenaikan BBM selalu diikuti oleh naiknya berbagai kebutuhan pokok. Kenaikan harga BBM ini tentu akan semakin mempersulit kehidupan, walaupun hanya untuk kebutuhan pangan sehari-hari.

Belajar dari pengalaman masa lalu, pemberian dana kompensasi BBM, terutama di tingkat implementasi, banyak menyimpan masalah. Mulai dari korupsi oleh pejabat-pejabat pelaksana atau yang lainnya, sampai pada pendataan kelompok sasaran (target grup) yang tingkat keakuratannya kurang. Itu menyebabkan penyaluran dana tidak tepat sasaran. Karena itu dampaknya kurang nyata untuk pengurangan angka kemiskinan. Kenyataan tersebut terjadi, salah satunya, karena absennya masyarakat dalam mengawasi proses pelaksanaan penyaluran dana kompensasi. Tanpa partisipasi masyarakat, maka tingkat penyimpangan dana semakin tinggi. Itu karena dana tersebut rawan korupsi, pemotongan dan kebocoran sebelum sampai kepada penerima yang berhak.

Dalam kaitan ini, masyarakat perlu memiliki kepedulian yang tinggi

untuk ikut mengawasi, agar dana kompensasi betul-betul sampai ke penduduk miskin. Lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan hendaknya ikut mengawasi penyaluran dana kompensasi BBM. Mereka harus terlibat aktif memantau pelaksanaan penyaluran dana kompensasi BBM, sehingga dana tersebut tidak semakin mengecil ketika sampai ke bawah (baca: orang miskin).

Dalam rangka mengawal dana kompensasi BBM 2005, adalah suatu keniscayaan agar kasus atau masalah yang terjadi pada masa lalu tidak terulang lagi. Sehingga dana kompensasi yang cukup besar ini tidak sia-sia, tetapi bermanfaat atau memiliki dampak terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat, khususnya penduduk miskin.

Agar dana kompensasi BBM memiliki ketepatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, maka partisipasi masyarakat menjadi penting untuk mengawal proses implementasinya. Partisipasi dari masyarakat diharapkan dapat mencegah kebocoran-kebocoran dalam penyaluran dana tersebut. Masyarakat harus terlibat aktif pada tahap pelaksanaan sampai dengan tahapan monitoring dan evaluasinya, terkait distribusi dana ke masyarakat penerima.

Formula partisipasi masyarakat menyangkut dua hal, *pertama*, masyarakat ikut aktif memberikan data-data kelompok sasaran dari penerima dana tersebut. Karena sering kali data-data yang dimiliki oleh pemerintah tingkat keakuratannya diragukan. Dalam hal ini, organisasi kemasyarakatan (ormas) atau LSM, individu-individu yang ada di masyarakat bisa menyediakan data-data alternatif kelompok penerima.

Data mengenai kelompok sasaran sangat diperlukan dalam rangka menyempurnakan data yang dimiliki oleh pihak pemerintah. Meski proses pelaksanaan pemberian dana kompensasi kini telah berlangsung, data yang akurat mengenai jumlah orang miskin tetap masih diperlukan. Data yang akurat tersebut bisa disusulkan, dan pemerintah harus meresponnya secara arif.

Di sisi lain, biasanya dalam penyaluran dana untuk orang/penduduk miskin dibarengi oleh banyaknya orang miskin dadakan atau musiman, sehingga jumlah penduduk miskin membengkak. Hal ini harus diwaspadai agar program kompensasi untuk penduduk miskin tidak menjadi salah sasaran. Jangan sampai, misalnya, orang-orang yang membutuhkan dana tersebut malah tidak mendapatkannya. Untuk itu koordinasi dengan institusi rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) serta lembaga-lembaga yang ada di kelurahan menjadi penting. Merekalah yang benar-benar mengetahui berapa jumlah penduduk miskin yang ada di wilayahnya. Karena institusi-institusi inilah yang bersentuhan secara langsung dengan penduduk di wilayahnya, termasuk penduduk miskin.

Dengan demikian, keakuratan dan ketepatan data mengenai kelompok sasaran penerima dana benar-benar sah dan teruji. Dana kompensasi pun tidak lagi salah sasaran atau salah tempat, tetapi benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat miskin. Faktor pendataan yang akurat dan sah

akan memberikan kontribusi sekitar 40 persen bagi keberhasilan program penyaluran dana kompensasi bagi penduduk miskin. Data yang tidak akurat menyebabkan carut-marutnya pelaksanaan program tersebut. Pada akhirnya dana kompensasi, seandainya tanpa data yang akurat tentang jumlah penduduk miskin, hanya akan mengulang nasib sial yang sama seperti terjadi pada program-program yang sama yang ditujukan untuk kelompok miskin.

Kedua, partisipasi dalam implementasi, monitoring dan evaluasi penyaluran dana kompensasi tersebut. Partisipasi masyarakat, dalam hal ini ikut melaporkan segala kebocoran dan tindakan korupsi, adalah penting. Segala bentuk penyimpangan harus dilaporkan kepada pihak berwajib. Dengan partisipasi masyarakat seperti itu diharapkan dana kompensasi BBM bisa mengurangi angka kemiskinan di Tanah Air. Partisipasi masyarakat dalam mengawal penyaluran dana kompensasi BBM sangat menentukan berhasil-tidaknya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan seluruh hasil pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disampaikan bahwa masyarakat miskin di kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karag Pusat hampir secara keseluruhan menganggap bahwa program SLT sangat bermanfaat dan membantu meringankan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun sebenarnya mereka mengakui bahwa jumlah dana yang diterima tidaklah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup selama 1 bulan karena konsekuensi dari kenaikan harga BBM yang membuat semua kebutuhan hidup meningkat biayanya dan itu tidak bisa ditutupi dengan bantuan program SLT.

Dengan demikian jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Program telah mengarah kepada kelompok sasaran yang telah

ditentukan. Penerima manfaat program SLT ini adalah betul-betul warga yang tergolong rumah tangga miskin sesuai dengan kriteria BPS. Peneliti telah melakukan triangulasi sumber yaitu dengan melakukan studi dokumentasi terhadap catatan yang dimiliki oleh pelaksana di kelurahan dan RT juga melalui observasi ke rumah-rumah warga miskin penerima manfaat SLT.

2. Pertanyaan tentang pelayanan dalam program SLT telah diberikan kepada seluruh warga yang berhak menerima program SLT. Hanya masalah sosialisasi yang kurang diberikan kepada warga dari tahap awal program ini dibuat untuk masyarakat, pada pencairan tahap kedua sosialisasi pada warga baru diberikan. Tentang ketepatan jumlah dana tidak ada masalah sementara ketepatan waktu pencairan sampai 3 tahap tepat waktu hanya tahap terakhir tidak tepat karena sampai saat ini belum ada berita kapan akan dicairkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan PKPS-BBM program SLT telah berjalan dengan cukup baik. Kesimpulan ini didasarkan atas jawaban dari seluruh fokus penelitian yang ditentukan dalam penelitian ini.

1. Program telah mengarah kepada kelompok sasaran yang telah ditentukan. Penerima manfaat program SLT ini adalah betul-betul warga yang tergolong rumah tangga miskin sesuai dengan kriteria BPS. Peneliti telah melakukan triangulasi

sumber yaitu dengan melakukan study dokumentasi terhadap catatan yang dimiliki oleh pelaksana di kelurahan dan RT juga melalui observasi ke rumah-rumah warga miskin penerima manfaat SLT.

2. Pertanyaan tentang pelayanan dalam program SLT telah diberikan kepada seluruh warga yang berhak menerima program SLT. Hanya masalah sosialisasi yang kurang diberikan kepada warga dari tahap awal program ini dibuat untuk masyarakat, hanya pada pencairan tahap kedua sosialisasi pada warga baru diberikan. Tentang ketepatan jumlah dana tidak ada masalah sementara ketepatan waktu pencairan sampai 3 tahap tepat waktu hanya tahap terakhir tidak tepat karena sampai saat ini belum ada berita kapan akan dicairkan.

SARAN

1. Sebaiknya dalam setiap program pemerintah harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi dalam masyarakat. Karena jika tidak ada sosialisasi terlebih dahulu dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan di masyarakat di kemudian hari.
2. Sebaiknya untuk membantu masyarakat miskin dipikirkan oleh pemerintah sebuah formulasi kebijakan yang betul-betul tepat untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan dari akarnya sehingga tidak terkesan hanya bantuan sesaat yang justru membuat masyarakat menjadi tergantung pada pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burgan (Ed), 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varians Kontemporer*, Jakarta, Radjagrafindo Persada.
- Chaedar, A. Alwasilah, 2002. *Pokoknya Kualitatif. Dasar-dasar Merancang dan Melakukan penelitian Kualitatif*, Bandung, Pustaka jaya.
- Dunn, William,N, 1981, *Public Policy Analysis*, Prentice Hall, New jersey, Englewood Chief
- Edward III, George C, 1984, *Public Policy Implementating*, London England Jai Press Inc
- Hadi, Sutrisno, 1984. *Metodologi Research. Jilid 2*, Yogyakarta,Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi.
- Jamasy, O, 2004. *Keadilan, pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta, Penerbit Belantika.
- Keban, Y,T, 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori, dan Isu)*. Yogyakarta, Gava Media,.
- Miles, M.B dan A.M. Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, UI-Press,
- Moleong, L.J, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya,
- Morgan, David L, 1997. *Focus Group as Qualitative Research*, London: Sage Publications
- Swasono, Sri Edi (Ed), 1997. *Sekitar kemiskinan dan Keadilan*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Yin, R.K, 1997. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Wahyudi, Ginanjar & Sulistiowati, Rahayu, 2005. *Evaluasi Pelaksanaan Beras Miskin di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Tanggamus (Berdasarkan Instruksi Bupati Tanggamus No. B.01/INS/05/03/2005)*, FISIP Universitas Lampung
-, 1997. Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Sejahtera, Kantor Menteri Negara Kependudukan / BKKBN Jakarta
-, 2004. Indonesia Human Development Report 2004, BPS, Bappenas, UNDP
-, 2005, Sosialisasi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi bahan bakar Minyak (PKPS-BBM), Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat, Jakarta
- Harian Media Indonesia, Harian Kompas, Harian Lampung Post, Harian Radar Lampung.